



Evaluasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta

Evaluation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Actioning Traffic Violations by The Regional Police Traffic Directorate D.I. Yogyakarta

Karunia Ramadhani Karini Venardi¹, Argo Pambudi¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 11-10-24

Diperbaiki 14-10-24

Disetujui 18-10-24

Kata Kunci:

Evaluasi, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Pelanggaran Lalu Lintas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta. Studi ini dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi aktual dengan harapan penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk dapat mengeksplorasi informasi mendalam terkait efektivitas sistem ETLE, permasalahan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang diperlukan. Melalui wawancara mendalam dan telaah dokumentasi, data kualitatif dikumpulkan guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang praktik penerapan ETLE di lapangan. Hasil penelitian mengindikasikan beberapa temuan penting: (1) Pelaksanaan ETLE oleh Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta memberikan dampak positif dalam penegakan hukum lalu lintas; (2) Ditlantas menunjukkan komitmen dan inovasi dalam mengatasi berbagai tantangan implementasi sistem ETLE melalui serangkaian upaya strategis; (3) Teridentifikasi adanya perubahan perilaku pengguna jalan ke arah yang lebih konstruktif; (4) Terjadi peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ETLE berpotensi dalam meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan efisiensi penegakan hukum, namun masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan. Hasil analisis ini, dapat memberikan rekomendasi strategis dalam mengoptimalkan kinerja sistem ETLE yang bertujuan untuk memperkuat disiplin masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

Evaluation, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Traffic Violations

This research aims to evaluate Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in prosecuting traffic violations by the D.I. Regional Police Traffic Directorate, Yogyakarta. This study was motivated by an increase in the number of traffic violations in the area which indicated a gap between actual conditions and the expectations of law enforcement. This research uses a qualitative descriptive approach. This method was chosen to be able to explore in-depth information regarding the effectiveness of the ETLE system, the problems faced, and the improvement efforts needed. Through in-depth interviews and documentation review, qualitative data was collected to gain a comprehensive understanding of ETLE implementation practices in the field. The results of the research indicate several important findings: (1) Implementation of ETLE by Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta has had a positive impact on traffic law enforcement; (2) Ditlantas shows commitment and innovation in overcoming various challenges in implementing the ETLE system through a series of strategic efforts; (3) Identified changes in road user behavior in a more constructive direction; (4) There has been an increase in public trust in police institutions. This research shows that the implementation of ETLE has the potential to improve traffic compliance and law enforcement efficiency, but still requires continuous improvement. The results of this analysis can strategic recommendations in optimizing the performance of the ETLE system which aims to strengthen community discipline.

1. Pendahuluan

Lalu lintas yang aman dan tertib menjadi isu krusial di tengah pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta yang merupakan salah satu destinasi wisata dan kota pendidikan. Peningkatan jumlah kendaraan secara signifikan tidak hanya memengaruhi kenyamanan berlalu lintas, tetapi juga memicu berbagai pelanggaran lalu lintas yang sering kali menjadi penyebab kecelakaan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar terus meningkat setiap tahun, dari 1.311.073 unit pada tahun 2017 menjadi 1.576.153 unit pada tahun 2020.

Tabel 1. Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di D.I. Yogyakarta

Tahun	Jumlah Pelanggar
2021	29.615
2022	46.848
2023	64.431

Sumber: Bappeda DIY, 2024

Tabel 1 menyajikan kenaikan pada jumlah pelanggar lalu lintas di D.I. Yogyakarta dari tahun ke tahun, dengan lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2023. Sejalan dengan peningkatan volume kendaraan, jumlah pelanggaran lalu lintas di D.I. Yogyakarta juga meningkat secara signifikan. Menurut data dari Bappeda D.I. Yogyakarta, jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat dari 29.615 pelanggar pada tahun 2021 menjadi 64.431 pelanggar pada tahun 2023. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini merupakan inovasi teknologi yang menggunakan Closed Circuit Television (CCTV) untuk mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas secara otomatis.

Peningkatan ini mengindikasikan pentingnya penyelesaian pelanggaran lalu lintas demi kenyamanan pengguna jalan. Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) merupakan aspek utama dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks mobilitas dan transportasi. Salah satu strategi yang telah diterapkan guna mencapai tingkat Kamseltibcarlantas yang optimal yaitu melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Perilaku pengguna jalan menjadi salah satu faktor terwujudnya Kamseltibcarlantas. Oleh karena itu, setiap pelanggaran lalu lintas harus ditindaklanjuti dengan tegas agar tidak terulang kembali dan dapat menjaga keselamatan pengguna jalan.

Bukti pelanggaran (tilang) adalah dokumen yang diberikan kepada individu yang melanggar peraturan lalu lintas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, langkah penindakan yang diambil oleh aparat kepolisian setiap terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah mengeluarkan surat tilang yang diberikan kepada pelanggar sebagai sanksi dan bukti atas pelanggaran yang telah terjadi. Seiring dengan perubahan zaman, teknologi mengalami perkembangan yang cepat dan membawa manfaat dalam berbagai sektor, termasuk tilang. Korps Lalu Lintas (Korlantas) memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan perangkat elektronik yaitu Tilang Elektronik.

Salah satu inovasi dalam pelaksanaan Tilang Elektronik yaitu sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai bentuk implementasi teknologi untuk mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas secara elektronik menggunakan *Closed Circuit Television* (CCTV). Secara prinsip, Tilang Elektronik mengurangi interaksi langsung antara pelanggar dan petugas kepolisian yang digantikan oleh sistem pencatatan *online*. Proses pencatatan ini didasarkan pada pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi melalui penggunaan kamera CCTV. CCTV tersebut mendeteksi aktivitas pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sehingga dapat mengambil foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Foto tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan.

Implementasi ETLE dalam proses tilang elektronik di D.I. Yogyakarta tampaknya belum optimal. Indikasi ini terlihat dari beberapa fenomena yang teramati di lapangan. Pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme ETLE masih terbatas, dan terdapat sikap apatis terhadap keberadaan kamera CCTV yang terpasang pada persimpangan jalan sejak diberlakukannya ETLE pada tahun 2021. Sebagian masyarakat terkesan menganggap kamera CCTV hanya sebagai bentuk intimidasi atau objek dekoratif tanpa memahami fungsi sebenarnya dalam penegakan hukum lalu lintas. Lebih lanjut, terlihat kecenderungan bahwa masyarakat lebih waspada ketika berhadapan langsung dengan petugas kepolisian dibandingkan ketika berada dalam jangkauan pengawasan kamera CCTV.

ETLE di D.I. Yogyakarta memiliki beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Menurut Faktawan & Al Kautsar (2022), salah satunya mengenai bukti rekaman kamera CCTV sebagai alat identifikasi pelanggar lalu lintas berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang melakukan pelanggaran [1]. Apabila kendaraan bermotor telah berpindah tangan kepada orang lain dan pemilik yang baru belum melakukan perubahan identitas pemilik kendaraan, maka surat konfirmasi tilang elektronik akan dikirimkan ke alamat pemilik lama sesuai dengan data registrasi kendaraan bermotor dan bukan kepada pelaku pelanggaran yang sebenarnya. Selain itu, penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti penggunaan huruf dan angka yang tidak jelas atau dimodifikasi menghambat proses identifikasi pelanggar. Terbatasnya pemasangan kamera pengawas (CCTV) di beberapa titik tidak cukup untuk mendukung kedisiplinan berlalu lintas, mengingat kepadatan lalu lintas di wilayah D.I. Yogyakarta.

Tabel 3 menyajikan data pelanggaran lalu lintas yang terekam ETLE. Berdasarkan data yang tersaji, setiap tahun terjadi peningkatan signifikan pada jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam melalui sistem ETLE. Fenomena ini bertentangan dengan ekspektasi jajaran penegak hukum di Polda D.I. Yogyakarta terkait implementasi ETLE. Harapan awal adalah terjadinya penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dan peningkatan ketertiban dalam perilaku berkendara di jalan raya. Idealnya, ketertiban ini dapat terwujud ketika masyarakat termotivasi untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

Tabel 3. Data Pelanggar Lalu Lintas yang Terekam ETLE

Tahun	Jumlah Pelanggar
2021	28.386
2022	41.843
2023	60.029

Sumber: Ditlantas Polda DIY, 2024

Evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan diterapkan mampu mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya [2]. Dalam konteks implementasi ETLE di Polda D.I. Yogyakarta, evaluasi ini menjadi semakin mendesak mengingat adanya peningkatan signifikan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam setiap tahunnya, bertentangan dengan ekspektasi awal. Urgensi evaluasi ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ETLE, serta merumuskan strategi perbaikan yang tepat guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Menurut Sastrini & Surata (2018), dampak dari pelanggaran lalu lintas sangat besar sehingga membutuhkan evaluasi dan tindakan perbaikan sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tertentu yang lebih efektif dan efisien [3]. Tindakan dan metode tersebut bertujuan untuk menciptakan keadaan tertentu dalam hal ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kepolisian telah melakukan berbagai upaya baik bersifat preventif maupun represif untuk menekan angka pelanggaran guna mencapai tujuan Kamseltibcarlantas. Dengan menegakkan aspek hukum melalui pemberian sanksi hukum terhadap pelanggar, pengemudi diharapkan untuk lebih mematuhi aturan berlalu lintas. Dengan demikian, kepolisian membutuhkan persepsi dan evaluasi langsung oleh masyarakat, sebab evaluasi kinerja yang diberikan langsung oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap citra kepolisian [4]. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dengan model evaluasi Bridgman dan Davis (2000).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui triangulasi metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif. Studi kasus, kausal komparatif, dan korelasi adalah tiga pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai subjek penelitian [5], [6]. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta. Proses penelitian dimulai dengan pra-observasi, penetapan metode dan subjek penelitian, pengumpulan dan analisis data, hingga penyajian temuan dalam bentuk naratif yang menyeluruh.

Lokasi penelitian berada di kantor Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta, dengan waktu penelitian berlangsung April hingga Juni 2024. Alasan memilih lokasi tersebut karena dapat menjelaskan indikator penelitian yang dipilih oleh peneliti. Adopsi awal ini menjadikannya lokasi yang ideal untuk mempelajari efek jangka panjang dari ETLE. Selain itu, D.I. Yogyakarta memiliki berbagai kondisi lalu lintas, termasuk lingkungan perkotaan dan pedesaan. Keragaman ini memungkinkan peneliti untuk menilai evaluasi ETLE dalam berbagai lingkungan. Pemilihan tempat tersebut juga relevan dengan penelitian yang fokus pada permasalahan ETLE dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci seperti pegawai Ditlantas, pelanggar ETLE, dan PT Pos Indonesia, sedangkan data sekunder meliputi artikel jurnal, dokumen resmi pemerintah, dan sumber media *online* yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data melibatkan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dirangkum, difokuskan, dan disajikan dalam bentuk naratif untuk memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian [7].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Evaluasi ETLE dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta

3.1.1 Input

Indikator *input* dalam evaluasi memiliki tujuan untuk mengatur keputusan dan memfokuskan pada penilaian terhadap sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Adapun komponen dari evaluasi input meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dana atau anggaran, dan berbagai prosedur atau aturan yang diperlukan. Pelatihan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien. Petugas dalam melaksanakan ETLE sudah baik, cepat, dan profesional. Masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, khususnya terkait dengan jam operasional pelayanan. Meskipun pelayanan yang diberikan selama jam operasional sangat memuaskan, masyarakat mengeluhkan adanya penutupan layanan pada jam istirahat, yang menyebabkan mereka harus menunggu lebih lama.

Dalam implementasi sistem tilang ETLE, diperlukan sejumlah sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan optimal. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi kamera CCTV, perangkat komputer, meja, kursi, dan kertas. Penyediaan sarana dan prasarana oleh Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Secara umum, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan tilang ETLE telah memenuhi kebutuhan operasional. Pendanaan dan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana di Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta diperoleh dari Korlantas pusat. Dana ini dialokasikan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tilang ETLE tersedia dan dalam kondisi yang optimal. Pendanaan dari Korlantas pusat mencakup berbagai aspek, mulai dari pembelian dan instalasi kamera CCTV, perangkat komputer, hingga perawatan rutin dan pembaruan sistem.

3.1.2 Process

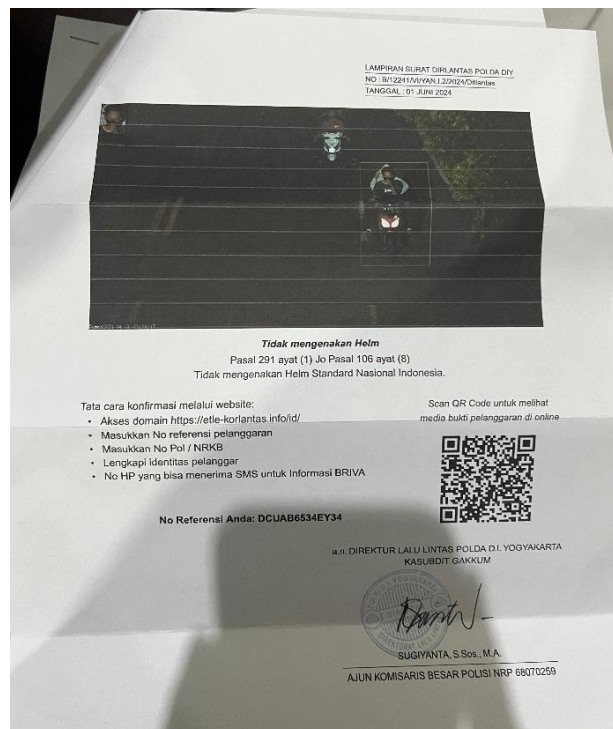
Evaluasi *process* menurut Bridgman dan Davis (2000) dapat dilakukan dengan mengamati bagaimana kebijakan diimplementasikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, serta menilai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut [8]. Mekanisme Pelaksanaan ETLE oleh Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari identifikasi pelanggaran melalui kamera CCTV, validasi data oleh petugas, hingga pengiriman surat tilang kepada pelanggar. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti kode BRIVA yang kedaluwarsa, secara umum masyarakat dapat mengikuti prosedur yang ada untuk menyelesaikan denda tilang. Tahapan pemblokiran kendaraan bagi pelanggar yang belum membayar denda juga diterapkan sebagai langkah untuk memastikan pemenuhan kewajiban.

Secara umum, efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ETLE dalam penindakan pelanggaran lalu lintas bertujuan menciptakan kepastian hukum, dan mendorong budaya tertib berlalu lintas merupakan beberapa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan ETLE. Meskipun beberapa pelanggar

mengeluhkan proses ETLE, seperti waktu pelayanan yang terbatas dan masalah Kode BRIVA yang kedaluwarsa, mayoritas pelanggar menyatakan bahwa proses ETLE sudah berjalan dengan baik. Beberapa pelanggar menganggap proses ETLE efektif, efisien, dan mudah diikuti. Mereka menyoroti kemudahan dalam pembayaran denda dan penyelesaian blokir kendaraan sebagai aspek positif dari sistem ETLE. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, mekanisme ETLE di Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.

3.1.3 Output

Menurut Bridgman dan Davis, indikator *output* berfokus pada penilaian hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan [9]. Hasil atau produk utama dari ETLE adalah berupa bukti pelanggaran lalu lintas dalam bentuk foto. ETLE telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam menegakkan hukum lalu lintas. Indikator *output* utama ETLE, yaitu bukti pelanggaran dalam bentuk foto, memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, meningkatkan efektivitas penindakan, dan mempercepat proses penilangan.



Gambar 1. Bukti Tilang ETLE
Sumber: Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta

Data yang dihasilkan oleh ETLE yang lainnya, seperti jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, dan lokasi pelanggaran, juga sangat bermanfaat untuk menganalisis pola pelanggaran lalu lintas dan merumuskan kebijakan lalu lintas yang lebih efektif. Dengan demikian, ETLE tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai alat manajemen lalu lintas yang komprehensif.

Gambar 2 menampilkan data terkait kinerja beberapa lokasi kamera ETLE. Informasi yang ditampilkan meliputi lokasi kamera, jumlah pelanggaran yang tertangkap, jumlah surat konfirmasi yang dikirim, dan status proses penindakan hingga pembayaran

denda. Data-data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis pola pelanggaran lalu lintas secara lebih mendalam, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan lalu lintas.

NO	LOKASI	TERTANGKAP KAMERA	VALID	TERKIRIM	TERKIRIM KORLANTAS	TERKONFIRMASI	TERKONFIRMASI WEBSITE	TERKONFIRMASI OFFLINE	TERTAGIH	TERBAYAR	AJUKAN BLOKIR
1	Jl. HOS Cokroaminoto 157, Tegalejo, Kec. Tegalejo, Kota Yogyakarta, DIY 55244	213870	1344	1328	0	408	239	169	350	303	558
2	Jl. Kusumanegara No.196 YK, Muja Muja, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55165	260805	323	322	0	113	79	34	110	97	220
3	TCE 900 Ketandan	142589	20472	19680	0	5660	3854	1806	5671	6375	14395
4	TCE 900 Maguwo	118612	333	257	0	96	61	35	98	105	185
5	TCE 900 Ngabean	348393	5193	4964	3	1812	1094	718	1846	2099	3383
6	TCV 900 Kulonprogo	116822	3539	3330	0	1059	652	407	1113	1380	2518
	Jumlah	1201091	31204	29881	3	9148	5979	3169	9188	10359	21259

Gambar 2. Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Lokasi ETLE di D.I. Yogyakarta
Sumber: Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta

Data pelanggaran lalu lintas berdasarkan lokasi ETLE di D.I. Yogyakarta (Gambar 2) mengilustrasikan potensi dalam menghasilkan informasi komprehensif tentang pola pelanggaran lalu lintas. Informasi ini mencakup lokasi kamera, jumlah pelanggaran, surat konfirmasi yang dikirim, dan status proses penindakan. Analisis mendalam terhadap data ini dapat menjadi dasar untuk formulasi kebijakan lalu lintas yang lebih efektif dan berbasis bukti. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk pengembangan indikator output ETLE. ETLE berpotensi untuk menghasilkan data yang lebih rinci, seperti kecepatan kendaraan saat melanggar, jenis kendaraan yang sering terlibat dalam pelanggaran, atau pemetaan lokasi rawan pelanggaran. Pengembangan ini dapat meningkatkan nilai strategis ETLE sebagai alat manajemen lalu lintas yang komprehensif.

3.1.4 Outcome

Kriteria indikator *outcome* meliputi relevansi antara misi dan tujuan program, pentingnya pengukuran, kemudahan pemahaman, pengaruh atau kendali yang memadai atas *outcome*, kelayakan dalam pengumpulan data, biaya pengumpulan data indikator yang terjangkau, keunikan, tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, serta komprehensif mencakup dampak positif dan negatif dari program atau kegiatan [10]. Dalam penelitian ini, *outcome* yang dimaksud adalah dampak yang terjadi setelah implementasi ETLE. Peneliti akan menjelaskan dampak-dampak yang muncul setelah ETLE diterapkan. Dampak ini dapat diartikan sebagai persepsi atau pendapat yang disampaikan oleh pelanggar maupun petugas mengenai keberadaan ETLE tersebut.

Implementasi ETLE menunjukkan beberapa dampak signifikan. Berdasarkan wawancara dengan pelanggar lalu lintas dan petugas, terungkap bahwa ETLE telah menghasilkan perubahan perilaku pengendara menjadi lebih tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas. Temuan ini selaras dengan konsep indikator *outcome* yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis (2000), yang menekankan pentingnya mengukur dampak langsung suatu kebijakan terhadap masyarakat. Data wawancara juga mengungkapkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum lalu lintas, terutama terkait transparansi dalam pembayaran denda.

Evaluasi dampak ETLE menggunakan kerangka Bridgman dan Davis serta teori-teori pendukung lainnya menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menghasilkan *outcome* yang positif. Perubahan perilaku pengendara, peningkatan kepercayaan masyarakat, memperkuat temuan penelitian bahwa ETLE memiliki dampak yang beragam, tidak hanya

pada aspek kepatuhan hukum, tetapi juga pada kepercayaan publik dan reformasi sistem penegakan hukum secara lebih luas. Pelaksanaan ETLE telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai outcomes yang diharapkan, yaitu perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas. Namun, penting untuk terus melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap efektif dan responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

3.2 Upaya Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta Mengatasi Permasalahan dalam Pelaksanaan ETLE

Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan ETLE yaitu pertama terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan tujuan dari ETLE yang menimbulkan sikap apatis terhadap kamera CCTV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem ETLE, termasuk proses penangkapan gambar pelanggaran dan prosedur penindakannya. Ketidakhahaman tersebut berdampak pada sikap masyarakat terhadap keberadaan kamera CCTV. Data yang diperoleh mengindikasikan bahwa banyak pengendara cenderung mengabaikan keberadaan kamera pengawas dan tidak merasa terdorong untuk mematuhi aturan lalu lintas. Akibatnya, tujuan ETLE untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas belum sepenuhnya tercapai pada sebagian kelompok masyarakat.

Masalah kedua yang ditemukan adalah kesulitan dalam memverifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menghambat proses identifikasi pelanggar. TNKB yang tidak sesuai bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penggunaan plat nomor palsu, modifikasi plat nomor yang tidak resmi, atau kondisi fisik plat nomor yang sudah tidak terbaca dengan jelas. Kondisi ini membuat sistem ETLE kesulitan dalam mencocokkan data kendaraan dengan pemiliknya yang terdaftar di *database*. Akibatnya, proses penindakan terhadap pelanggar menjadi terhambat, memerlukan waktu lebih lama, dan memerlukan upaya tambahan dari petugas untuk memastikan identitas pelanggar sebenarnya.

Permasalahan ketiga yang dihadapi dalam pelaksanaan ETLE adalah kesalahan dalam mengirim surat tilang yang disebabkan oleh pemilik kendaraan belum melakukan perubahan identitas. Ketika kendaraan berpindah tangan, seringkali pemilik baru tidak segera memperbarui informasi identitas mereka dalam *database* kendaraan. Akibatnya, surat tilang yang seharusnya dikirim kepada pelanggar yang baru justru dikirimkan ke alamat pemilik lama yang tercatat.

Permasalahan terakhir yaitu terkait bukti tilang dari CCTV yang dikirimkan melalui pos sering kali tidak diterima langsung oleh pelanggar. Masalah ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti alamat yang terdaftar sudah tidak lagi ditempati oleh pelanggar, pelanggar tidak berada di tempat saat surat dikirimkan, atau bahkan kesalahan dalam penulisan alamat tujuan. Akibatnya, banyak pelanggar tidak segera mengetahui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran denda ETLE. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta melakukan beberapa upaya.

Pertama, mereka melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan plat nomor yang sesuai ketentuan dan memberikan arahan serta himbuan saat operasi tak kasat mata. Kedua, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Korlantas Pusat untuk meningkatkan teknologi kamera agar lebih canggih dalam mengatasi tantangan identifikasi TNKB. Ketiga, untuk mengatasi masalah surat tilang yang tidak sampai, dapat menerapkan sistem pemblokiran administrasi di Samsat bagi pelanggar yang belum membayar denda. Keempat,

bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan proses pengiriman surat tilang berjalan lancar dan meminimalisir surat retur. Terakhir, pihak kepolisian juga aktif mengimbau masyarakat untuk selalu memperbarui data alamat di Samsat, terutama saat melakukan perpanjangan STNK atau perubahan kepemilikan kendaraan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta telah menunjukkan dampak positif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Evaluasi menggunakan kerangka Bridgman dan Davis mengungkapkan bahwa sistem ETLE telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum lalu lintas. Dari segi *input*, terdapat optimalisasi sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, namun masih dihadapkan pada tantangan terkait jam operasional pelayanan.

Indikator *process* menggambarkan pendekatan yang sistematis, meski masih ditemui kendala teknis seperti permasalahan dalam pengiriman surat konfirmasi dan sistem pembayaran denda. *Output* ETLE menunjukkan peningkatan kepastian hukum dan efisiensi penindakan pelanggaran dengan bukti foto sebagai produk utama. Sementara itu, *outcome* yang dihasilkan mencakup perubahan positif dalam perilaku pengguna jalan serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Temuan menarik dari penelitian ini adalah dampak ETLE terhadap peningkatan kepercayaan publik pada institusi kepolisian melalui sistem yang lebih transparan, suatu aspek yang memperluas pemahaman tentang peran teknologi dalam penegakan hukum. Penelitian ini secara umum mendukung teori evaluasi kebijakan Bridgman dan Davis, namun juga memperkaya pemahaman dengan menambahkan dimensi sosial dan persepsi publik dalam konteks penerapan teknologi penegakan hukum. Kerangka evaluasi yang digunakan terbukti efektif dalam menganalisis berbagai aspek implementasi ETLE, sementara temuan penelitian menekankan pentingnya mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis, tetapi juga aspek sosial dan budaya dalam implementasi teknologi baru.

Upaya penyempurnaan dan evaluasi berkelanjutan masih diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi ETLE, meskipun telah menunjukkan potensi positif. Upaya ini mencakup peningkatan edukasi publik, penyempurnaan teknologi, dan perbaikan sistem administrasi. Penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang evaluasi kebijakan dalam konteks penerapan teknologi modern untuk penegakan hukum, tetapi juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan persepsi publik dalam implementasi kebijakan teknologi. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas cakupan evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas.

Referensi

- [1] Faktawan, F., & Al Kautsar, I. (2022). Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta). *Wajah Hukum*, 6(1), 86–97.
- [2] Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Buku Kita.
- [3] Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib). *Kertha Widya*, 6(2).
- [4] Indarti, S. (2014). Pengaruh Persepsi Masyarakat Dan Evaluasi Kinerja Terhadap Citra Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 8(2), 1-15.

- [5] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jawa Barat: Alfabeta, 2019.
- [6] S. Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- [7] M. B. and A. M. H. Miles, Qualitative Data Analysis. Jakarta: UI Press, 2014.
- [8] Miftahuddin, M. (2009). Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Kota Semarang). Universitas Diponegoro.
- [9] Muluk, N. B. (2009). Evaluation for Language and Speech Development in Kabuki Make-up Syndrome: A Case Report. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 73(12), 1837–1840.
- [10] Nugroho, Y. (2016). Institutions, Outputs and Outcomes. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(3), 296–319.